

SKRIPSI

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA

**(Studi Kasus Pada Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja,
Kabupaten Barru)**



**ANDI SYAFRI TANETE
1610421111**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA

**(Studi Kasus Pada Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja,
Kabupaten Barru)**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar sarjana pada Program Studi Manajemen

**ANDISYAFRI TANETE
1610421111**

**ROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSISAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru)

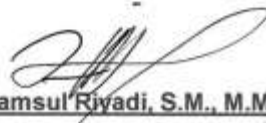
Disusun dan diajukan oleh

ANDI SYAFRI TANETE
1610421111

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Seminar Hasil/Skripsi
Pada Tanggal **23 Agustus 2023** Dan Dinyatakan Lulus

Makassar, 23 Agustus 2023
Disetujui Oleh,

Pembimbing,



Syamsul Riyadi, S.M., M.M.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Dr. Yusmanan, S.Sos., M.I.Kom.

SKRIPSI


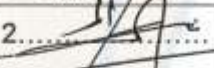


PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru)

disusun dan diajukan oleh

ANDI SYAFRI TANETE
1610421111

telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
Pada Tanggal **23 Agustus 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syamsul Riyadi, S.M., M.M.	Ketua	1. 
2.	Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. H. Syamsuddin Bidol, M.M.	Anggota	3. 
4.	Drs. Rachmat Sugeng, S.H., M.M.	Anggota	4. 

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

NAMA : ANDI SYAFRI TANETE
NIM : 1610421111
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru)”** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 23 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Andi Syafri Tanete

PRAKATA

Bismillahirrahmanirahim

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu WaTa'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, dan hanya peneliti masih diberi kesehatan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Salallahualaihi Wasalam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang gemilang ini. Dimana penulisan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARASI, PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA KADING, KECAMATAN, TANETE RIAJA KABUPATEN BARRI)”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial pada jurusan Manajemen konsentrasi manajemen keuangan. Walaupun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh peneliti saat menyusun skripsi. Dan apa bila tanpa adanya dukungan dari banyak pihak laporan ini tidak akan pernah terselesaikan. Terima kasih Bapak H. Abdul Rahman, S.KM dan Ibu Hj. Sudarmi selaku kedua orang tua peneliti yang selalu mendoakan dan mendukung kepada peneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta keluarga besar peneliti atas dukungannya secara moril maupun materil. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
2. Ibu Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.
3. Bapak Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E. selaku Ketua Program Studi Manajemen.
4. Bapak Dr. H. Syamsuddin Bidol, M.M selaku penasehat akademik.
5. Bapak Syamsul Riyadi S.M., M.M. Selaku Dosen Pembimbing tugas akhir yang senantiasa membimbing, serta memberikan saran mengenai penelitian sehingga peneliti dapat mengerjakan skripsi dengan baik.
6. Seluruh dosen pengajar Program Studi Manajemen Universitas Fajar, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Manajemen Unifa.

8. Dan semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

Penulis berharap semoga karyanya selalu dapat bermanfaat bagi penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini.

Makassar, 23 Agustus 2023

Andi Syafri Tanete

ABSTRAK

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru)

**Andi Syafri Tanete
Syamsul Riyadi**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dalam bentuk penilaian responden tentang akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengelolaan dana Desa. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat., dan Pengelolaan Dana Desa Kading

ABSTRACT

THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY AND COMMUNITY PARTICIPATION ON VILLAGE FUND MANAGEMENT (Case Study In Kading Village, Tanete Riaja District, Barru District)

**Andi Syafri Tanete
Syamsul Riyadi**

This study aims to determine the effect of accountability, transparency and community participation on the management of funds in Kading Village, Tanete Riaja District, Barru District. The data used in this study are primary data in the form of respondents' assessments of accountability, transparency, community participation and management of village funds. Methods of data collection using questionnaires and literature study. Data analysis techniques using multiple linear regression analysis, t test, F test and coefficient of determination test. The results of the study found that accountability, transparency and community participation had a positive and significant effect on the management of funds for Kading Village, Tanete Riaja District, Barru Regency.

Keywords: Accountability, Transparency, Community Participation, and Village Fund Manageme

DAFTAR ISI

HALAMALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Kerangka Teori	7
2.1.1 <i>Good Governance</i>	7
2.1.2 Akuntabilitas.....	10
2.1.3 Transparansi	14
2.1.4 Partisipasi	19
2.1.5 Pengelolaan Dana Desa	22
2.2 Tinjauan Empirik.....	32
2.3 Kerangka Pikir	40
2.4 Hipotesis.....	41
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	42
3.1 Rancangan Penelitian.....	42
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
3.3 Populasi dan Sampel.....	42
3.4 Jenis dan Sumber Data	43
3.5 Metode Pengumpulan Data	43
3.6 Metode Analisis Data.....	44
3.7 Definisi Operasional.....	49
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1. Gambaran Umum Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru	55
4.2. Hasil Penelitian	61
4.3. Pembahasan.....	76
BAB V. PENUTUP	80
5.1. Kesimpulan	80
5.2. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Tinjauan Empirik.....	32
3.1 Definisi Operasional	53
4.1 Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa Kading Tahun 2022	59
4.2 Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	60
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	61
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	61
4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	62
4.6 Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Akuntabilitas	62
Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Transparansi	63
4.7 Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Partisipasi Masyarakat.....	63
4.8 Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Pengelolaan	
4.9 Dana Desa	64
4.10 Uji Validitas	65
4.11 Uji Reliabilitas.....	66
4.12 Uji Multikolinearitas	71
4.13 <i>Coefficients</i>	72
4.14 Uji t.....	73
4.15 Uji F.....	74
4.16 Uji Koefisien Determinasi	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pikir	45
4.1 Struktur Organsiasi BPD.....	59
4.2 Struktur Pemerintah Desa	60
4.3 Grafik Histogram.....	67
4.4 <i>Normal Prabability Plot</i>	68
4.5 Diagram <i>Scatterplot</i>	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Tiap kabupaten/kota mendistribusikan alokasi dana desa ke setiap pedesaan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan kesulitan letak geografis. Kebijakan ini tentu memiliki konsekuensi terhadap keefektifan proses pengelolaan alokasi dana desa sebab sumber daya manusia (sebagai pengelola alokasi dana desa) pada suatu desa tentu tidak bisa diukur berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Putra dan Rasmini (2019) menyatakan bahwa asas pemerataan dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi.

Pelaksanaan otonomi daerah menjadi kesempatan yang baik untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan *Good Governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta penegakan hukum. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi

daerah, perlu adanya hubungan antar susunan pemerintah daerah dan keanekaragaman daerah (Renyowijoyo, 2013).

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah mempunyai upaya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah secara tepat waktu dan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam mengelola keuangan daerah dibutuhkan standar akuntansi pemerintah yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diterima secara umum. Pelaporan keuangan yang dilakukan pemerintah harus didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai keterbukaan pelaporan (Fauziyah, 2017).

Pada pengelolaan keuangan daerah tingkat Desa, pengelolaan dana Desa penting agar dapat mengurangi tuduhan unsur politis dari dana Desa yang telah dianggarkan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Alokasi dana Desa pada tahun 2019 diiringi dengan aspek perencanaan yang tepat agar tidak menjadi alat politik dan kepentingan pribadi. Alokasi dana Desa harus akuntabel dan transparan untuk laporan pertanggungjawaban keuangan Desa tersebut. Dana Desa digunakan untuk mendorong partisipasi masyarakat guna kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa yang diputuskan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa berhubungan erat dengan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat.

Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015). Hasil penelitian Ultafiah (2017), Sukmawati (2019), Sari, dkk (2019), Jaa (2019), Andriani (2019), Napisah dan Taufiqurachman (2020), Zulfadzal (2020), dan Permatasari, dkk (2021), menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap

pengelolaan dana desa. Sebaliknya hasil penelitian Fahri (2020), menemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Transparansi adalah penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya (Mahmudi, 2015). Hasil penelitian Ultafiah (2017), Jaa (2019), Andriani (2019), Fahri (2020) dan Napisah dan Taufiqurachman (2020), menemukan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Sebaliknya hasil penelitian Sukmawati (2019), menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya (Tilaar, 2009). Hasil penelitian Jaa (2019), Andriani (2019), Zulfadzal (2020), dan Permatasari, dkk (2021), menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Sebaliknya hasil penelitian Ultafiah (2017), menemukan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil *review* penelitian terdahulu di atas maka ditemukan adanya *research gap* berupa inkonsistensi (tidak konsisten) hasil penelitian. Bahwa tidak selalu pengelolaan dana publik dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk kembali melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa dengan mengambil Desa Kading sebagai objek penelitian.

Desa Kading adalah salah satu desa di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Permasalahan yang terjadi di Desa Kading terkait pengelolaan dana desa yakni aparat pengelola dana desa belum dapat memahami aturan – aturan tentang pengelolaan dana desa. Selain itu, beberapa orang masyarakat masih mengeluhkan terkait kurang transparannya pengelolaan dana desa. Berdasarkan fenomena ini maka peneliti mengambil judul penelitian **Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru?
4. Apakah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
4. Untuk mengetahui pengaruh simultan dari akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan informasi dan kontribusi yang berguna untuk pengembangan keilmuan terutama dalam topik akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana Desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan guna membantu pihak pemerintah Desa dalam melihat pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana Desa.

2. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bahan referensi tentang akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan pengelolaan dana Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Teori keagenan adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. *Principal* adalah subyek yang mengamanatkan pihak lain, khususnya *agent*, untuk melakukan segala aktivitas atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Jika kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, diyakini bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal* (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori keagenan bermaksud memecahkan dua problem yang terjadi dalam hubungan keagenan. Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara *prinsipal* dan *agen* disebut dengan *agency problems*. Salah satu penyebab *agency problems* adalah adanya asimetri informasi. *Agency Theory* dalam penelitian menjustifikasikan bahwa kepala desa dalam pengelolaan DD tidak menjalankannya sesuai dengan regulasi yang berujung pada terjadinya patologi sosial berupa penyimpangan. Kelebihan informasi yang dimiliki oleh kepala desa maupun perangkatnya yang dalam hal ini bertindak sebagai agen memang mudah dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan. Hal ini berpotensi terjadi karena mereka lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, memiliki keterbatasan rasionalitas dan penghindar risiko (*risk averse*) sehingga mereka cenderung untuk melakukan penyimpangan.

2.1.2 Good Governance

1. Pengertian Good Governance

Good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2014).

Good governance adalah penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sector swasta dan masyarakat. Berdasarkan uiaian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* merupakan tata pemerintahan yaitu penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompokkelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

2. Karakteristik Good Governance

Karakteristik pelaksanaan *good governance* (Mardiasmo, 2014) meliputi:

a. Participation

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan yang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga

perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

b. *Rule of law*

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

c. *Transparency*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan) Responsiveness Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.

d. *Consensus orientation*

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

e. *Equity*

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

f. *Efficiency dan Effectiveness*

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

g. *Accountability*

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

h. *Strategic vision*

Penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

Dari sembilan prinsip Good Governance tersebut terdapat tiga prinsip utama yang melandasinya yaitu Akuntabilitas, transparansi dan

partisipasi. Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Sedarmayanti, 2009). Dimana ketika setiap aktivitas pengelolaan telah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya, lalu di ikuti dengan keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan, hal itu akan menciptakan tata kelola yang baik dalam suatu organisasi.

2.1.3 Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (Principal). Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015).

Akuntabilitas (*Accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab. dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Waluyo, 2009).

Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,

melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principala*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo. 2014).

Berdasarkan beberapa referensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dimana pemerintah dan aparat desa harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam. yaitu (Mardiasmo, 2014):

a. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*).

Pertanggung jawaban Vertikal (*vertical Accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

b. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

2. Macam – Macam Akuntabilitas

Dimensi Akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga – lembaga publik tersebut antara lain (Mahmudi, 2015):

a. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga – lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku.

b. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD/ dan masyarakat luas.

e. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga – lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Prinsip akuntabilitas ini perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat, maka dari itu diperlukan pihak pemegang yang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan dan memberikan laporan terkait keuangan desa kepada kelompok sasaran dalam hal ini yaitu masyarakat. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan Dana Desa mengarahkan aparat desa untuk mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

3. Indikator Keberhasilan Akuntabilitas

Indikator keberhasilan akuntabilitas (Lalolo, 2007) yaitu:

- a. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa;
- b. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintah desa; dan
- c. Berkurangnya kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di dalam lingkup pemerintah desa.

2.1.4 Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor (Solekhan, 2012). Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti (Mahmudi, 2015).

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2014). Salah unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintah, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas.

Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2016).

Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,

yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

Tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Defenisi dari beberapa sumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat

untuk mengakses berbagai informasi tentang pengelolaan dana desa, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut. Dengan adanya transparansi maka publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual sehingga masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut untuk (Mahmudi, 2015).

- a. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran);
- b. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran;
- c. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait; dan
- d. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

2. Indikator Transparansi

Menurut Kristianten (dalam Ultafiah, 2017), indikator – indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggung jawaban;
- b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat;
- c. Keterbukaan proses pengelolaan; dan
- d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa

3. Karakteristik Transparansi

Prinsip transparansi, pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan atau masukan serta dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik

transparansi yang harus diperhatikan. Karakteristik transparansi (Mardiasmo, 2014) yaitu:

- a. *Informativeness* (Informatif) Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat;
- b. *Openess* (keterbukaan) Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada dibadan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi public; dan
- c. *Disclouser* (pengungkapan) Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

2.1.5 Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi adalah prinsip dimana masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Mewujudkan anggaran yang

efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran (Utami & Efrizal, 2013). Masyarakat diharapkan terlibat dalam penyusunan APBD dan masyarakat juga ikut mengontrol semua kebijakan pemerintah dilapangan. Tanpa kontrol kuat dari masyarakat, berbagai bentuk penyimpangan sangat mungkin terjadi, maka salah satu hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat adalah mekanisme penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat telah mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran yang sebenarnya, maka diharapkan masyarakat akan terlibat dalam pengawasan anggaran (Rahayu, 2010).

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010). Partisipasi juga dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan (Solekhan, 2012).

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan ber asosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2014). Defenisi dari beberapa sumber diatas membuat penulis mengambil Kesimpulan bahwa partisipasi adalah wujud dari keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, mulai dari

keikutsertaan dan keterlibatan pada saat melakukan perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi, untuk mencapai hasil yang tepat sasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelum pembangunan masyarakatnya.

2. Macam – Macam Partisipasi

Tahap pelaksanaan program partisipasi antara lain (Solekhan, 2012).

- a. Pengambilan keputusan, yaitu penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.

- b. Pelaksanaan, yaitu penggerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.
- c. Pengambilan manfaat, yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.
- d. Evaluasi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

2.1.6 Pengelolaan Dana Desa

Terdapat beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang dana desa, berikut ini penulis uraikan beberapa peraturan yang mengatur tentang dana desa. Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi, “Dana Desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.”

Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi, “pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.”

Dana desa berdasarkan PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang desa dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan

digunakan untuk membiayai pembangunan, penyelenggaraan pembinaan masyarakat.

PP No. 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP No. 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP No. 60 Tahun 2014 ke PP No. 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa. Berdasarkan dari pengertian pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pengelolaan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di pe rgunakan untuk pembangunan desa dan sebagai pendapatan desa.

1. Perencanaan

Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dan harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk keterkaitan dan konsistensi dalam memberikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- 3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari

sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau Sebutan Lain.

- 5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari ke rja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 6) Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 7) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/ Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- 9) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 10) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Berdasarkan dari pengertian pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa perencanaan adalah suatu proses dalam penentuan tujuan organisasi untuk mempermudah agar tercapinya sebuah tujuan dan langkah langkah yang ingin di capai.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya anggaran yang terdapat pada desa tersebut telah ditentukan sebelumnya dan timbul pada transaksi atas penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangannya dilaksanakan dengan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum terdapat pelayanan perbankan di wilayahnya maka akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Menurut Sujarweni (2015), terdapat beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.

- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- 7) Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- 8) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- 9) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
- 10) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja; dan lampiran bukti transaksi.
- 11) Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- 12) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- 13) Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan dari pengertian pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pelaksanaan adalah sebuah rencana yang sudah

disusun secara matang untuk mendapatkan hasil atau keinginan yang di harapkan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bul an membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Menurut Hamzah (2015), Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan da n berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yan g wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1) Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahandalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangkapenerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3) Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

Berdasarkan dari pengertian pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa penatausahaan adalah pencatatan yang dilakukan oleh bendahara atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan dan dicatat dalam buku kas umum yang bersifat tunai.

4. Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

- 1) Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
- 2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- 3) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- 4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan dari pengertian pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pelaporan adalah suatu kegiatan penyampaian laporan yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan sebagai hasil dari suatu pekerjaan yang dilakukan selama satu periode tertentu.

5. Pertanggungjawaban

Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
 - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan dari pengertian pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pertanggungjawaban adalah suatu penyampaian yang dapat di pertanggungjawabkan pelaksanaannya yang tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi harus disampaikan kepada masyarakat sebagai bukti bahwa laporan tersebut telah terealisasi dengan baik.

2.1.7 Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Akuntabilitas dengan Pengelolaan Dana Desa

Agency Theory berkaitan dengan variabel akuntabilitas, mengingat akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari *agent* (perangkat desa) atas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa kepada *principal* (masyarakat desa). Dengan demikian semakin baik akuntabilitas atas suatu kegiatan maka cenderung semakin baik efektifitas pengelolaan dana desa yang terjadi.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 24 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas yang digunakan dalam lingkup pemerintahan termasuk diantaranya pemerintahan desa adalah akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial adalah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menggunakan dana public secara efektif, ekonomi dan efisien, terhindar dari kebocoran dan pemborosan dana serta korupsi (Mahmudi, 2015).

2. Hubungan Transparansi dengan Pengelolaan Dana Desa

Transparansi dianggap suatu hal yang diperhatikan dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi transparansi yang terjadi maka cenderung semakin efektif pengelolaan dana desa. Teori keagenan menjelaskan adanya asimetri informasi, yaitu keadaan dimana *principal* tidak memperoleh informasi yang sama dengan *agent*, sehingga dengan adanya

transparansi yang tinggi principal dapat memperoleh informasi selengkap-lengkapannya dan terjadinya asimetri informasi dapat dihindari.

Transparansi adalah bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2014). Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya (Umami & Nurodin, 2017).

3. Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat bisa menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka cenderung semakin tinggi pula efektifitas pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan *agency theory* bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu penilaian *principal* pada kinerja dari *agent*.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran (Utami & Efrizal, 2013). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa diatur dalam Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 pada pasal 54 tentang musyawarah desa. Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawartkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.2 Tinjauan Empirik

Tabel 2.1
Tinjauan Empirik

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
1.	Ultafiah (2017)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat	Data yang digunakan adalah data primer dan skunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner. Pengujian yang digunakan yaitu, uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi.	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh di 19 desa di Kecamatan Merapi iarat, disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial signifikan memengaruhi

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
				<p>pengelolaan dana desa. sedangkan variabel partisipasi secara parsial tidak signifikan memengaruhi pengelolaan dana desa. Adapun variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara simultan memengaruhi pengelolaan dana desa untuk mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat.</p>
2.	Sukmawati	Pengaruh	Metode penelitian	Hasil penelitian

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
	(2019)	Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)	yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas, reliabilitas, uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, koefisien determinasi, uji t dan uji F menggunakan aplikasi Statistical Product and Service Solution (SPSS).	ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2%.

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
3.	Sari, dkk (2019)	Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode total sampling. Jenis data yang digunakan adalah sata subjek, sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer. Data tersebut diperoleh secara langsung dengan menggunakan kuesioner dari subjek penelitian yaitu kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini dengan cara	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Akuntabilitas berpengaruh signifikan negative terhadap potensi kecurangan dana desa (2) Kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negative terhadap potensi kecurangan dana desa (3) Pengendalian intern

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
			menyebarkan kuesioner kepada kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.	berpengaruh signifikan negative terhadap potensi kecurangan dana desa
4.	Jaa (2019)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Gunung Turi Kabupaten Manggarai	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dengan teknik pengambilan sampel menggunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh terhadap Pembangunan Desa. Pelaksanaan

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
		Timur)	simple random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda.	prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sudah diterapkan. Dengan pelaksanaan ketiga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat memberikan pengaruh terhadap pembangunan desa dengan menunjukan tingkat pembangunan desa gurun turi yang sudah mulai meningkat.

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
5.	Andriani (2019)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa	Data penelitian ini diperoleh dengan kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa dengan metode purposive sampling. Populasi penelitian ini adalah masyarakat desa Luk yang sudah S1, D3, D2, dan D1 yang terdaftar sebagai penduduk asli Dea Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 113 responden. Untuk menguji responden	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tranparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan dana Desa.

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
			<p>dengan Kuesioner di uji valditas dan uji reliabilitas sebelum penelitian. Setelah meneliti dilakukan uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, Uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linier berganda.</p>	
6.	Napisah dan Taufiqurrachman (2020)	Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Bandung	Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan adalah data primer, data diperoleh dari penyebaran kuesioner pada	Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
			<p>perangkat desa dan masyarakat desa. Sampel penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan program yang digunakan menggunakan SPSS 23.00.</p>	<p>dana desa, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Secara simultan akuntabilitas publik dan transparansi berpengaruh secara signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan sebesar 38,3% sedangkan sisanya 61,7% dipengaruhi variable lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.</p>
7.	Fahri (2020)	Akuntabilitas, Efektivitas dan	Penelitian ini menggunakan	1) Akuntabilitas tidak

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
		<p>Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada: Desa di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)</p>	<p>pendekatan kuantitatif.</p>	<p>berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa. 2) Efektivitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa. 3) Transparansi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pengelolaan dana desa. 4) Akuntabilitas, efektivitas dan</p>

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
				transparansi pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
8.	Zulfadzal (2020)	Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Di Gampong Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif jenis penelitian korelasi. Sampel penelitian 100 orang pelanggan. Teknik pengumpulan data kuesioner. Analisa data menggunakan, uji normalitas, heterogenitas, uji korelasi serta uji hipotesis	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur (Y), hal ini sebagaimana hasil uji Fhitung >

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
		Kabupaten Pidie)		<p>Ftabel yaitu $179,526 > 3,09$ sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa kuntabilitas pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur. Sedangkan hasil Uji t menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $14,163 > 1,984$, artinya terdapat</p>

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
				<p>hubungan yang signifikan antara akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastrukur. Begitu juga partisipasi masyarakat berhubungan signifikan dengan pembangunan infrastruktur karena nilai thitung > dari ttabel, atau $12,921 > 1,984$. Jika dilihat hasil analisis koefisien determinasi terdapat pengaruh akuntabilitas</p>

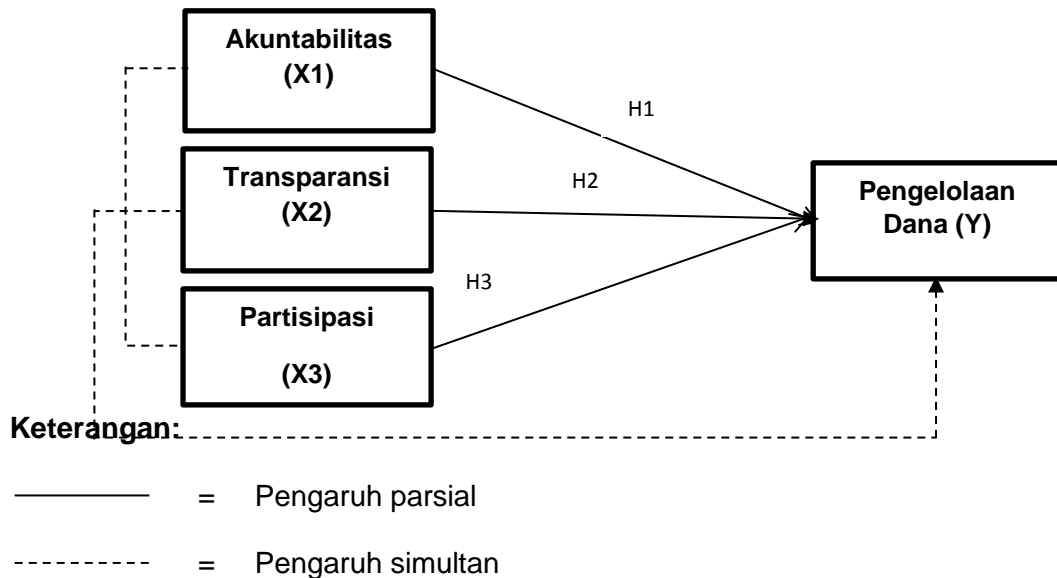
No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
				<p>pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur sebesar 67,2%, sedangkan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur sebesar 63,0%.</p>
9.	Permatasari, dkk (2021)	<p>Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>	<p>Pada penelitian ini populasinya ialah pemerintah desa di kecamatan kanor dan badan permusyawaratan desa. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sampel dipilih berdasarkan</p>	<p>Hasil dari penelitian mempertunjukkan bahwa masyarakat yang berpartisipasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa cukup berpengaruh pada efektivitas</p>

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
		Sebagai Variabel Intervening	pertimbangan yang memiliki tujuan data yang diperoleh lebih representative. Membagikan kuesioner kepada responden adalah cara untuk pengumpulan data.	pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan jika partisipasi oleh masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin tinggi, efektivitas pengelolaan dana desa di kecamatan kanor, juga lebih baik.

Sumber: Penulis, 2023

2.3 Kerangka Pikir

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka pikir, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H₁ : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
- H₂ : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
- H₃ : Partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
- H₄ : Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan susunan rencana penelitian dari tahap membentuk pertanyaan penelitian hingga menemukan jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif korelasional sebab tujuan penelitian ini untuk membuktikan hubungan antara variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan pengelolaan dana desa.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Penelitian ini akan dilaksanakan selama satu bulan terhitung bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.

3.3 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian adalah seluruh masyarakat Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

3.2.2 Sampel

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2012), adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representative (mewakili). Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Menurut Arikunto (2012), jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-

15% atau 20-25% dari jumlah populasinya. Dengan demikian maka besaran sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 34 orang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

1. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang bentuk angka, seperti tabulasi isian kuisisioner.

2. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang tidak dalam bentuk angka, seperti profil Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pembagian kuesioner. Sementara data sekunder diperoleh dari dokumentasi.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kuesioner

Kuesioner dilakukan dengan membagikan daftar pertanyaan kepada responden penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengambil dokumen yang mendukung penyelesaian persoalan penelitian di kantor Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah suatu metode analisis dimana data-data dikumpulkan, diklarifikasikan, dikelompokkan, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan secara objektif dalam rangka menerangkan objek tertentu. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk membantu menerangkan hasil temuan penelitian dengan berbantuan aplikasi SPSS 21.0 for windows.

3.6.2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Validitas adalah skala dimana kesimpulan yang dibuat dengan berdasarkan skor menurut angka menjadi sesuai. Pengujian validitas ini menggunakan *Total Correlation (Corrected Item)*, analisis ini dengan caramengkolerasikan masing-masing skor item dengan skor total dan melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang overestimasi. Pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian ini menggunakan metode statistik *Cronbach Alpha* dengan nilai sebesar 0,06. Apabila *Cronbach Alpha* dari suatu variabel $\geq 0,6$ maka butir pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut adalah reliabel atau dapat diandalkan, dan sebaliknya jika nilai *Cronbach Alpha* $< 0,6$ maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel.

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusinormal atau tidak (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan pengujian berikut:

1) Histogram

Pengujian dengan model histogram memiliki ketentuan bahwa data normal berbentuk lonceng. Data yang baik adalah data yang memiliki pola distribusi normal. Jika data melenceng ke kanan atau melenceng ke kiri berarti data tidak terdistribusi secara normal.

2) Grafik *Normality Probability Plot*

Dalam uji ini, ketentuan yang digunakan adalah:

- a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas; dan
- b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Konsekuensinya adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksir yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun besar. Salah

satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat pada grafik *scatter plot*.

Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tak ada pola yang jelas maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas juga dapat diketahui dengan melakukan uji glejser. Jika variabel bebas signifikan secara statistic mempengaruhi variabel terikat maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi kolerasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinieritas pada penelitian dilakukan dengan matriks kolerasi. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks kolerasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai VIF (*variance inflation factor*) dan *tolerance*-nya. Apabila nilai matriks korelasi tidak ada yang lebih besar dari 0,5 maka dapat dikatakan data yang akan dianalisis terlepas dari gejala multikolinearitas. Kemudian apabila nilai VIF berada dibawah 10 dan nilai *tolerance* mendekati 1, maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinieritas (Ghozali, 2016).

3.6.4. Regresi Linear Berganda

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda. Analisis Regresi Linear Berganda merupakan analisis yang digunakan untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variable faktor penyebab (X) terhadap variable akibatnya (Y). Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots e$$

Di mana:

Y	=	Pengelolaan Dana Desa
α	=	Konstanta
b_1, b_2, b_3	=	Koefisien
X_1	=	Akuntabilitas
X_2	=	Transparansi
X_3	=	Partisipasi
E	=	Standar error

3.6.5. Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel-variabel independen secara bersama mampu memberikan penjelasan mengenai variabel dependen dimana nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel – variabel independen. Sebaliknya jika R^2 kecil, maka akan semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat di jelaskan oleh variabel independen.

3.6.6. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel *independet* (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen* (Y). Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05. Jika nilai signikansi < taraf

signifikan 0,05 maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau dengan kata lain H_a diterima dan H_0 ditolak. Sebaliknya Jika nilai signifikansi $>$ taraf signifikan 0,05 maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ditolak atau dengan kata lain H_a ditolak dan H_0 diterima.

3.6.7. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel *independet* (X) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen* (Y). Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi $<$ taraf signifikan 0,05 maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau dengan kata lain H_a diterima dan H_0 ditolak. Sebaliknya Jika nilai signifikansi $>$ taraf signifikan 0,05 maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ditolak atau dengan kata lain H_a ditolak dan H_0 diterima.

3.7 Definisi Operasional

Tabel 3.1

Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Akuntabilitas (X1)	Kewajiban pihak pemegang amanah (<i>agent</i>) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan	1). Akuntabilitas kejujuran dan hukum; 2). Akuntabilitas manajerial; 3). Akuntabilitas program; 4). Akuntabilitas kebijakan; dan	Ordinal

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
	kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (<i>principal</i>) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2014).	5). Akuntabilitas finansial.	
Transparansi (X2)	Penjelasan manajemen organisasi sector public tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya (Mardiasmo, 2014)	1). Informatif; 2). Keterbukaan; dan 3). Pengungkapan.	Ordinal
Partisipasi (X3)	Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan	1). Pengambilan keputusan; 2). Pelaksanaan; 3). Pengambilan manfaat; dan 4). Evaluasi.	Ordinal

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
	<p>yang dapat menyalurkan aspirasinya. (Mardiasmo, 2014)</p>		
<p>Pengelolaan Dana Desa (Y)</p>	<p>Seluruh rangkaian kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember (PP No. 113 Tahun 2014)</p>	<p>1). Tahap perencanaan; 2). Tahap pelaksanaan; 3). Tahap penatausahaan; 4). Tahap pelaporan; dan 5). Tahap pertanggungjawaban.</p>	<p>Ordinal</p>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru

4.1.1. Sejarah Desa

Terbentuknya Desa Kading diawali dengan hasil Pemekaran dari Desa Lompo Tengah dengan melalui Desa Persiapan pada tanggal 01 oktober 1989 yang dipimpin langsung oleh H. Abd. Samad Bahtra selama dalam waktu \pm 3 Tahun lamanya. Desa Kading sebagai Desa Definitif (Resmi) sebagai Desa dalam wilayah Kecamatan Tanete Riaja pada tahun 1993 dan diadakan pemilihan kepala desa. pada masa pemerintahan orde baru H. Abd. Samad Bahtra terpilih sebagai Kepala Desa Kading Pertama dan menjabat 2 (dua) periode lamanya mulai tahun 1993 – 2002. Kemudian pada tahun 2002 diadakan lagi pemilihan kepala Desa Kading dan yang terpilih adalah Muhammad Ridwan sebagai kepala Desa yang ke-2 (dua) masa Jabatan tahun 2002-2007 dalam waktu lima tahun. Kemudian selanjutnya dijabat sementara oleh Sekretaris desa pada waktu itu yaitu Halikman, S.Sos. selama 7 bulan lamanya. dan pada tahun 2008 kembali dilaksanakan pemilihan kepala Desa Kading dan kembali saudara Muhammad Ridwan terpilih sebagai kepala Desa Kading untuk kedua kalinya (2 Priode) dengan masa jabatan tahun 2008-2014. dengan selesainya masa jabatan Muhammad Ridwan sebagai kepala Desa Kading, maka Pada tahun 2014 dibentuklah Pelaksana Jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa pada waktu itu dan terpilihlah H. Mustakim. P, S.Sos. sampai tahun 2016. Pada tanggal 09 Desember 2016 kembali dilaksanakan Pemilihan kepala Desa Kading dengan masa jabatan

2017-2023 dengan hasil pemilihan secara demokrasi maka terpilihlah H. Akmaluddin, S.Sos. sebagai kepala Desa Kading yang 3 (Tiga) sampai sekarang ini. Desa kading pada awalnya memiliki tiga Dusun yaitu Dusun Bunne, Dusun Pasar Baru & Dusun Tokkene masing –masing dikepalai oleh saudara Ranreng sebagai Kepala Dusun Bunne, Abd. Halim sebagai kepala dusun Pasar Baru & Muh. Syafar sebagai kepala Dusun Tokkene dengan Jumlah penduduk ± 2.800 Jiwa pada masa waktu desa persiapan. Kemudian pada tahun 1993 Desa kading sudah defenitif mengalami pergeseran jumlah dusun menjadi 5 dusun yaitu dibentuk Dusun Rumpiae dan Dusun Umpungge dengan Jumlah penduduk semakin bertambah dan mengalami juga pergeseran kepala dusun yaitu Kepala Dusun Rumpiae dijabat oleh Abd. Halim, Dusun Pasar Baru dijabat oleh Muha sedangkan Dusun Umpungge dijabat Oleh Muh.Syafar.

Untuk lebih jelasnya berikut silsilah Kepala Desa yang pernah memimpin desa Kading dari jaman dahulu sampai saat ini:

1. H. Abd. Samad Bahtra : Periode Tahun 1989 – 1993
2. H. Abd. Samad Bahtra : Periode Tahun 1993 – 2002
3. Muhammad Ridwan : Periode Tahun 2022 – 2007
4. Halikman, S.Sos. : Periode Tahun 2008
5. Muhammad Ridwan : Periode Tahun 2008 – 2014
6. H. Mustakim.P, S.Sos : Periode Tahun 2014 – 2016
7. H. Amaluddin, S.Sos : Periode Tahun 2017 – 2023
8. Muhammad Asrar : Tahun 2022
9. H. Akmaluddin : Periode Tahun 2023-2029

4.1.2. Wilayah Administratif

Lokasi Desa Kading berada di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dengan luas wilayah \pm 2.269 Ha. dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Anabanua;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mattampawalie;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lompo Riaja; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lompo Tengah

Jika dilihat dari letak geografisnya Desa Kading terletak antara $119^{\circ}37'41''$ LS - 119.675911 BT/ -4.510828 LS, jarak antara Ibukota Desa dengan Ibu kota Kabupaten Barru sejauh 24 Km lewat darat, dapat di tempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat dengan waktu \pm 45 menit, Desa Kading memiliki jarak dari ibukota kecamatan Tanete Riaja \pm 3 Km dengan jarak tempuh \pm 5 menit, Desa Kading memiliki jarak dari ibukota Propinsi Sulawesi Selatan \pm 100 Km dengan jarak tempuh \pm 2 Jam.

Desa Kading terbagi dalam 5 Dusun, dan 14 RT yaitu Dusun Bunne, Dusun Rumpiae, Dusun Pasar Baru, Dusun Umpungge dan Dusun Tokkene. Ketinggian tanah wilayah Desa 0-500 Mdpl dari permukaan laut, dengan suhu rata – rata antara 20°C sampai dengan 30°C dengan curah hujan rata–rata 1,00 mm/tahun. merupakan daerah dataran rendah dan dataran tinggi dengan kondisi Tanah Sawah dan Pengunungan Sehingga dengan kondisi seperti sangat memungkinkan untuk menjadikan Desa Kading menjadi daerah pertanian dan perkebunan.

4.1.3. Struktur Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Barru Nomor 21 Tahun 2017 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa. Menurut tingkat pendidikannya, kondisi perangkat desa Kading Tahun 2022 seperti ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut ini:

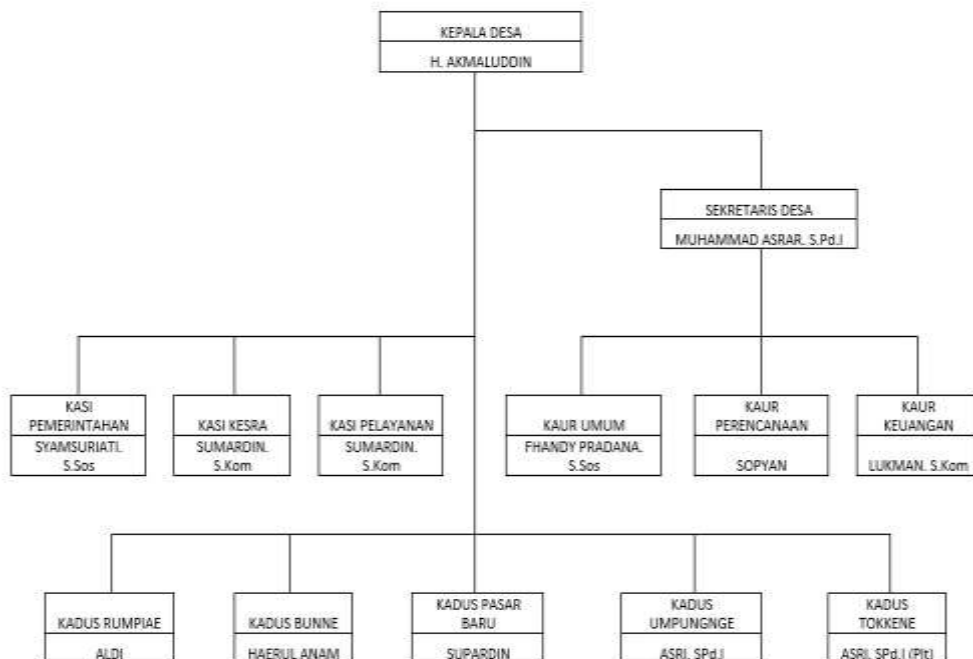
Tabel 4.1
Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa Kading Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Persentasi
1.	S1	8	73%
2.	SLTA	3	27%
3.	SLTP	-	0%
JUMLAH		11	100%

Sumber: Profil Desa Kading 2022

Adapun Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kading sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Pemerintah Desa



4.1.4. Struktur Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari:

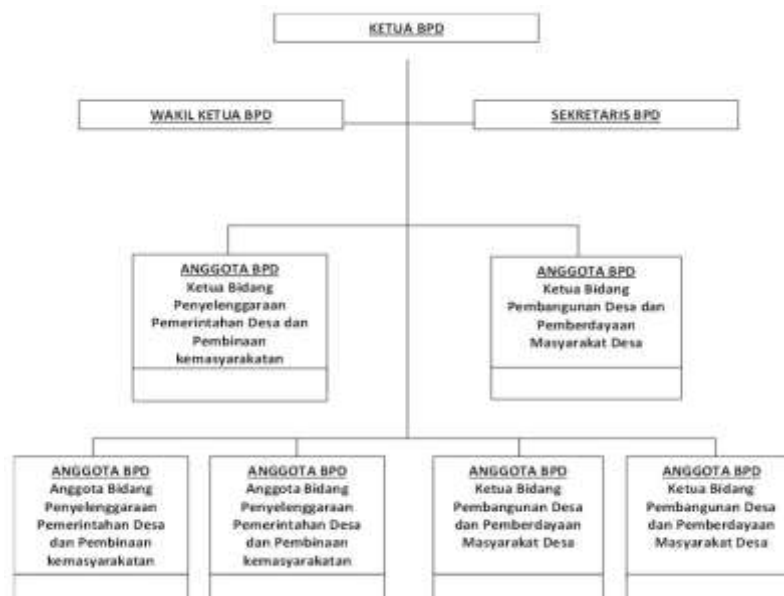
Tabel 4.2
Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No	Keterwakilan Wilayah	Jumlah Orang
1.	Dusun Pasar Baru	3 Orang
2.	Dusun Bunne	2 Orang
3.	Dusun Rumpiae	1 Orang
4.	Dusun Umpungnge	1 Orang
5.	Dusun Tokkene	1 Orang
6.	Keterwakilan Perempuan	1 Orang
	Jumlah	9 Orang

Sumber: Profil Desa Kading 2022

Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Kading sebagai berikut.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi BPD



4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Karakteristik Responden

1. Karakteristik Responden berdasarkan Umur

Tabel 4.3
Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Persentase
<40 Tahun	12	35,3%
≥40 Tahun	22	64,7%
Total	34	100,0%

Sumber: data primer diolah, 2023

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa responden dalam penelitian ini berjumlah 34 orang di mana berdasarkan kelompok umur, didominasi oleh kelompok umur ≥40 Tahun sebanyak 22 orang (64,7%). Sisanya 12 orang (35,3%) adalah responden dengan kelompok usia <40 Tahun.

2. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki – laki	28	82,4%
Perempuan	6	17,6%
Total	34	100,0%

Sumber: data primer diolah, 2023

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa responden dalam penelitian ini berjumlah 34 orang di mana berdasarkan jenis kelamin, didominasi oleh laki – laki sebanyak 28 orang (82,4%). Sisanya 6 orang (17,6%) adalah perempuan.

3. Karakteristik Responden berdasarkan Jabatan

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	Persentase
Pemerintah Desa	11	32,4%
BPD	9	26,5%
Tokoh Masyarakat	3	8,8%
Tokoh Pemuda	2	5,9%
BumDes	3	8,8%
Kelompok Tani	6	17,6%
Total	34	100,0%

Sumber: data primer diolah, 2023

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa responden dalam penelitian ini berjumlah 34 orang di mana berdasarkan jabatan atau posisi di masyarakat didominasi oleh pegawai pemerintah desa sebanyak 11 orang (32,4%). Berikut adalah anggota BPD sebanyak 9 orang (26,5%). Selanjutnya dari Kelompok Tani sebanyak 6 orang (17,6%). Sementara tokoh masyarakat dan pengelola BumDes masing – masing sebanyak 3 orang (8,8%). Yang terakhir dari tokoh pemuda sebanyak 2 orang (5,9%).

4. Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.6

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
S1	24	70,6%
S2	7	20,6%
SMA	3	8,8%
Total	34	100,0%

Sumber: data primer diolah, 2023

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa responden dalam penelitian ini berjumlah 34 orang di mana berdasarkan latarbelakang pendidikan, didominasi oleh kelompok pendidikan S1 sebanyak 24

orang (70,6%). Berikut S2 sebanyak 7 orang (20,6%). Sisanya 3 orang (8,8%) adalah responden dengan kelompok pendidikan SMA.

4.2.2 Distribusi Jawaban Responden

1. Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Akuntabilitas

Tabel 4.7
Distribusi Jawaban Responden Variabel Akuntabilitas

X1	Akuntabilitas										Skor	Rerata
	STS		TS		KS		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
X11	0	0,0	7	20,6	11	32,4	16	47,1	0	0,0	111	3,26
X12	0	0,0	7	20,6	15	44,1	12	35,3	0	0,0	107	3,15
X13	0	0,0	5	14,7	16	47,1	13	38,2	0	0,0	110	3,24
X14	0	0,0	7	20,6	10	29,4	17	50,0	0	0,0	112	3,29
X15	2	5,9	11	32,4	12	35,3	9	26,5	0	0,0	96	2,82

Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa indikator yang paling dominan adalah indikator akuntabilitas kebijakan dengan nilai rata – rata sebesar 3,29. Berikut adalah indikator akuntabilitas kejujuran dan hukum dengan nilai rata – rata sebesar 3,26. Indikator akuntabilitas program memiliki nilai rata – rata 3,24. Selanjutnya indikator akuntabilitas manajerial dengan nilai rata – rata 3,15. Sementara indikator akuntabilitas finansial memiliki nilai rata – rata sebesar 2,82.

2. Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Transparansi

Tabel 4.8
Distribusi Jawaban Responden Variabel Transparansi

X2	Transparansi										Skor	Rerata
	STS		TS		KS		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
X21	1	2,9	5	14,7	14	41,2	14	41,2	0	0,0	109	3,21
X22	3	8,8	7	20,6	9	26,5	15	44,1	0	0,0	104	3,06
X23	3	8,8	7	20,6	9	26,5	15	44,1	0	0,0	104	3,06
X24	1	2,9	9	26,5	9	26,5	15	44,1	0	0,0	106	3,12

Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa indikator yang paling dominan adalah indikator informatif dengan nilai rata – rata sebesar 3,21. Berikut adalah indikator pengungkapan dengan nilai rata – rata sebesar 3,06. Sementara indikator terbuka memiliki nilai rata – rata sebesar 3,06.

3. Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Partisipasi Masyarakat

Tabel 4.9
Distribusi Jawaban Responden Variabel Partisipasi Masyarakat

X2	Partisipasi Masyarakat										Skor	Rerata
	STS		TS		KS		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
X21	0	0,0	1	2,9	11	32,4	22	64,7	0	0,0	123	3,62
X22	0	0,0	3	8,8	17	50,0	14	41,2	0	0,0	113	3,32
X23	0	0,0	2	5,9	20	58,8	12	35,3	0	0,0	112	3,29
X24	0	0,0	1	2,9	11	32,4	22	64,7	0	0,0	123	3,62

Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa indikator yang paling dominan adalah indikator pengambilan keputusan dan evaluasi, masing – masing memiliki nilai rata – rata sebesar 3,62. Berikut adalah indikator pelaksanaan dengan nilai rata – rata sebesar 3,32. Sementara indikator pengambilan manfaat memiliki nilai rata – rata sebesar 3,29.

4. Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Pengelolaan Dana Desa

Tabel 4.10
Distribusi Jawaban Responden Variabel Pengelolaan Dana Desa

Y	Pengelolaan Dana Desa										Skor	Rerata
	STS		TS		KS		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Y1	0	0,0	8	23,5	10	29,4	16	47,1	0	0,0	110	3,24
Y2	0	0,0	10	29,4	14	41,2	10	29,4	0	0,0	102	3,00
Y3	0	0,0	11	32,4	13	38,2	10	29,4	0	0,0	101	2,97
Y4	0	0,0	7	20,6	12	35,3	15	44,1	0	0,0	110	3,24
Y5	2	5,9	12	35,3	11	32,4	9	26,5	0	0,0	95	2,79

Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa indikator yang paling dominan adalah indikator tahap perencanaan dan tahap pelaporan, masing – masing memiliki nilai rata – rata sebesar 3,24. Berikut adalah indikator tahap pelaksanaan dengan nilai rata – rata sebesar 3,00. Indikator tahap penatausahaan memiliki nilai rata – rata sebesar 2,97. Sementara indikator tahap pertanggungjawaban memiliki nilai rata – rata sebesar 2,79.

4.2.3 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Tabel 4.11
Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	X11	0,894 > 0,286	Valid
	X12	0,795 > 0,286	Valid
	X13	0,732 > 0,286	Valid
	X14	0,815 > 0,286	Valid
	X15	0,745 > 0,286	Valid
Transparansi (X2)	X21	0,798 > 0,286	Valid
	X22	0,857 > 0,286	Valid
	X23	0,838 > 0,286	Valid
	X24	0,857 > 0,286	Valid
Partisipasi Masyarakat (X3)	X41	0,829 > 0,286	Valid
	X42	0,672 > 0,286	Valid
	X43	0,605 > 0,286	Valid
	X44	0,657 > 0,286	Valid
Pengelolaan Keuangan (Y)	Y1	0,922 > 0,286	Valid
	Y2	0,789 > 0,286	Valid
	Y3	0,808 > 0,286	Valid
	Y4	0,752 > 0,286	Valid
	Y5	0,719 > 0,286	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2023

Validitas pertanyaan dari setiap variabel diketahui dengan membandingkan r -hitung dengan r -tabel. r -tabel dapat dihitung dengan $df=N-2$. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 34, sehingga $df=34-2=32$, $r_{(32)} = 0,286$. Jika r -hitung > r -tabel, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dalam dalam kuesioner adalah valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Corrected Item – Total* > 0,286.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menunjukkan seberapa besar suatu instrument tersebut dapat dipercaya dan digunakan sebagai alat pengumpul data. Reliabilitas instrumen yang semakin tinggi, menunjukkan hasil ukur yang didapatkan semakin terpercaya (*reliabel*). Penentuan reabilitas instrumen suatu penelitian adalah:

- 1) Jika *cronbach's alpha* $< 0,6$ maka reabiliti dikatakan buruk;
 - 2) Jika *cronbach's alpha* $0,6 - 0,8$ maka reabiliti dikatakan cukup;
- dan
- 3) Jika *cronbach's alpha* $> 0,8$ maka reabiliti dikatakan baik.

Berikut adalah hasil uji reliabilitas atas variable – variabel:

Tabel 4.12

Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Akuntabilitas	0,853	Baik
Transparansi	0,856	Baik
Partisipasi masyarakat	0,628	Cukup
Pengelolaan dana desa	0,855	Baik

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, menunjukkan bahwa semua variabel yang dijadikan instrumen dalam penelitian adalah reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data. Sehingga berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas, menunjukkan bahwa instrument memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien *alpha* $> 0,60$, jadi hasil ukur yang akan didapatkan dapat dipercaya.

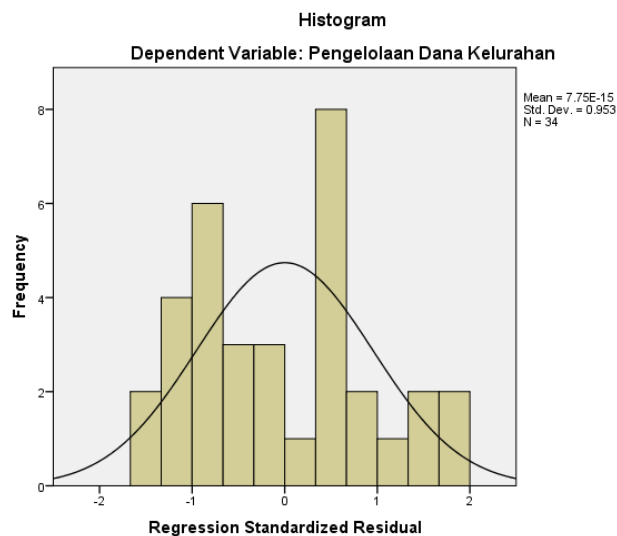
4.2.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Cara mendeteksi normalitas dilakukan dengan melihat grafik *histogram*.

Gambar 4.3

Grafik Histogram



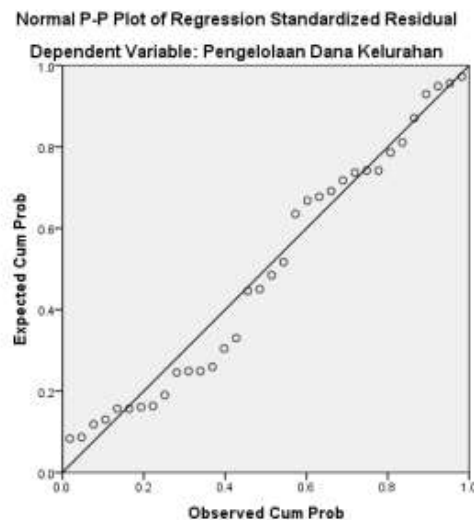
Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan grafik histogram diatas, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal, hal ini dibuktikan dengan melihat bahwa grafik membentuk simetris dan mengikuti garis diagonal. Akan tetapi grafik histogram ini hasilnya tidak terlalu akurat apalagi ketika jumlah sampel yang digunakan kecil.

Metode yang handal adalah dengan melihat *normal probability plot*. Pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.

Gambar 4.4

Normal Probability Plot



Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan grafik *normal probability plot*, dapat dilihat bahwa titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa pola distribusinya normal. Melihat kedua grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variansi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data

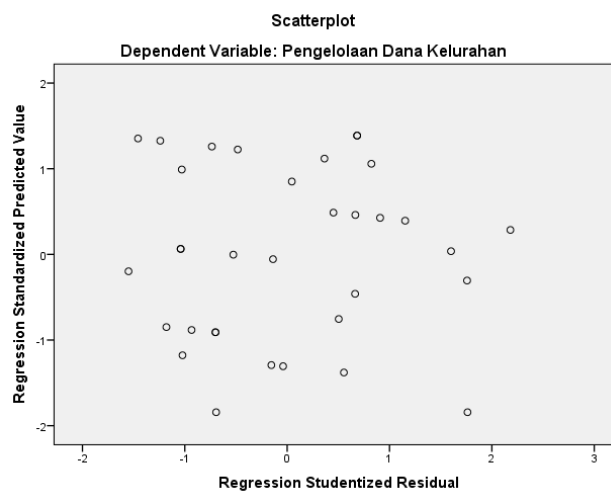
cross section memiliki data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisitas, metode yang digunakan adalah metode chart (diagram *Scatterplot*).

Jika:

- 1) Jika ada pola tertentu terdaftar titik-titik, yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi Heteroskedastisitas.
- 2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Gambar 4.5

Diagram *Scatterplot*



Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan diagram diatas, maka dapat dilihat bahwa data tersebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadinya perbedaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

3. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan menguji adanya korelasi antara variabel bebas (*independent*) pada model regresi. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel. Untuk menguji ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, yaitu dengan melihat *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cut-off* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,01. Salah satu cara untuk menguji adanya multikoloniearitas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai $VIF > 10$ maka terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.13
Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Keterangan
Akuntabilitas	4,538	Tidak Multikolinearitas
Transparansi	3,111	Tidak Multikolinearitas
Partisipasi Masyarakat	2,043	Tidak Multikolinearitas

Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel di atass, dapat disimpulkan bahwa model regresi untuk variabel independen yang diajukan oleh peneliti untuk diteliti bebas dari multikolinearitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat table diatas yang menunjukkan nilai VIF dari masing-masing variabel independen < 10 , dan dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

4.2.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel bebas (*independent*) terhadap

variabel terikat (*dependent*). Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat dari persamaan berikut.

Tabel 4.14
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-.500	.136		-3.685	.001
1 Akuntabilitas	.867	.052	.834	16.713	.000
Transparansi	.087	.034	.105	2.543	.016
Partisipasi	.157	.055	.096	2.873	.007

Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel *Coefficients* hasil *output SPSS* di atas maka diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,500 + 0,867X_1 + 0,087X_2 + 0,157X_3$$

Dalam persamaan regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan secara rinci:

1) Konstanta (α)

Konstanta sebesar $-0,500$. Hal ini berarti jika tidak ada perubahan dari variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa akan menurun sebesar $0,500$. Dengan kata lain, pengelolaan dana desa menjadi tidak baik. Negatifnya nilai konstanta menunjukkan bahwa variabel independent yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengelolaan dana desa yang baik.

2) Akuntabilitas (X_1)

Nilai koefisien regresi untuk akuntabilitas sebesar $0,867$. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Setiap peningkatan

akuntabilitas akan memberikan dampak pada meningkatnya pengelolaan dana desa sebesar 0,867.

3) Transparansi (X2)

Nilai koefisien regresi untuk transparansi sebesar 0,087. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Setiap peningkatan transparansi akan memberikan dampak pada meningkatnya pengelolaan dana desa sebesar 0,087.

4) Partisipasi Masyarakat (X3)

Nilai koefisien regresi untuk partisipasi masyarakat sebesar 0,157. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa partisipasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Setiap peningkatan partisipasi akan memberikan dampak pada meningkatnya pengelolaan dana desa sebesar 0,157.

4.2.6 Uji Parsial (Uji t)

Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05. Jika $Sig > 0,05$ maka hipotesis yang diajukan ditolak. Sebaliknya Jika $Sig < 0,05$ maka hipotesis yang diajukan diterima.

Tabel 4.15

Uji t

Varibel	Sig.< α	Keterangan	Hipotesis
Akuntabilitas	0,000<0,05	Signifikan	Diterima
Transparansi	0,016<0,05	Signifikan	Diterima
Partisipasi Masyarakat	0,007<0,05	Signifikan	Diterima

Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan hasil uji parsial telah dilakukan diketahui bahwa sistem akuntabilitas (X1), transparansi dan partisipasi masyarakat (X3) masing – masing secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Dengan demikian maka hipotesis pertama (H1), hipotesis kedua (H2) dan hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini **diterima**.

4.2.7 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan dari semua variabel *independet* (X) terhadap variabel *dependen* (Y). Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05. Jika Sig.>0,05 maka hipotesis yang diajukan ditolak. Sebaliknya Jika Sig.<0,05 maka hipotesis yang diajukan diterima.

Tabel 4.16
Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	13.774	3	4.591	597.467	.000 ^b
Residual	.231	30	.008		
Total	14.005	33			

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan hasil uji simultan yang telah dilakukan antara variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa diketahui bahwa nilai Sig. adalah sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari derajat kesalahan ($\alpha=0,05$) ($0,00<0,05$). Dengan demikian maka hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini di mana akuntabilitas, transparansi dan partisipasi

masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru **diterima**.

4.2.8 Uji Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel independen.

Tabel 4.16
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.992 ^a	.984	.982	.08766

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi di atas, diketahui bahwa pengelolaan dana desa mampu dijelaskan oleh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat sebesar 98,4%. Sisanya 1,6% dari pengelolaan dana desa dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Coefficient determination (R-Square) digunakan untuk mengukur seberapa banyak variabel endogen dipengaruhi oleh variabel lainnya. Chin dalam Ghozali (2016), menyebutkan hasil R^2 sebesar 0,67 ke atas untuk variabel dependen dalam model struktural mengindikasikan pengaruh variabel independen (yang mempengaruhi) terhadap variabel depedenen (yang dipengaruhi) termasuk dalam kategori baik. Sedangkan jika hasilnya sebesar 0,33 – 0,67 maka termasuk dalam kategori sedang, dan jika hasilnya sebesar 0,19 – 0,33 maka termasuk dalam kategori lemah. Dengan demikian maka model penelitian ini dapat dikategorikan baik.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan dana desa

Kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas merupakan faktor pendukung pengelolaan dana desa yang baik. Hal ini sejalan dengan pandangan Halim (2014), bahwa akuntabilitas mengharuskan seseorang/badan menjawab dan menerangkan kinerjanya kepada pihak yang meminta dengan demikian maka seseorang/badan tersebut akan mengelola dengan sebaik-baiknya segala sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, termasuk sumberdaya finansial.

Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini berarti bahwa akuntabilitas merupakan faktor penentu baik dan tidaknya pengelolaan keuangan pada Desa Kading. Hal ini disebabkan karena pihak pemerintah Desa Kading menerapkan akuntabilitas pada semua lini, baik kejujuran dan hukum, manajerial, program dan kebijakan maupun akuntabilitas finansial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Tamara (2016) dan Ngakil (2020) yang menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

4.3.2. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan dana desa

Transaparansi dalam penelitian ini adalah penjelasan pihak kelurahan tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Hal ini mengindikasikan bahwa transparansi merupakan faktor pendukung pengelolaan keuangan yang baik pada tingkat kelurahan. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi masyarakat desa untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah kelurahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Hal ini sangat penting, mengingat pemerintah kelurahan mengelola dana publik yang digunakan untuk kepentingan publik pula.

Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini berarti bahwa transparansi merupakan faktor penentu baik dan tidaknya pengelolaan keuangan di Desa Kading. Hal ini disebabkan karena pemerintah kelurahan sudah berusaha untuk informatif, terbuka dalam mengungkapkan dan menyampaikan pengelolaan dana desa.

Hasil peneltiian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Tamara (2016), yang menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

4.3.3. Pengaruh Partisipasi Terhadap Pengelolaan dana desa

Partisipasi dalam penelitian ini adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak

langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung pengelolaan keuangan yang baik pada tingkat kelurahan. Hal ini sejalan dengan pandangan Kim & Schachter (2013), partisipasi akan mendorong terjadinya pertukaran informasi antara masyarakat dengan aparat pemerintah.

Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini berarti bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu baik dan tidaknya pengelolaan keuangan di Desa Kading. Hal ini disebabkan karena masyarakat dilibatkan bukan saja dalam pengambilan keputusan melainkan juga dalam pelaksanaan keputusan – keputusan, pengambilan manfaat dan evaluasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Dewi (2019) dan Walyati (2020), yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
3. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
4. Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan penelitian di atas maka saran yang diberikan dari penelitian adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dalam rangka memperbaiki pengelolaan keuangan perlu memperhatikan tiga faktor yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Hal ini didasarkan pada temuan di mana ketiga faktor tersebut memberikan kontribusi pada perbaikan pengelolaan keuangan.
2. Kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian sejenis dengan mengambil lokasi berbeda atau menambahkan faktor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Matia. 2019. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa*. Journal of Accounting, Finance and Auditing. Vo. 1, No. 2 (2019).
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fahri, Syaeful. 2020. *Akuntabilitas, Efektivitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada: Desa di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Yayasan Keluarga Pahlawan Negara", Yogyakarta.
- Fauziah, Miftahul Reza. 2017. *Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 6, No. 6, Juni 2017.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. 25 Edisi 9. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jaa, Emilianus. 2019. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Gunung Turi Kabupaten Manggarai Timur)*. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi. Vol. 7, No. 1, April 2019.
- Jensen, M.C. & W.H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3 (4), 305-360.
- Lalolo. K. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Cetakan pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Lima. Cetakan Keempat. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Napisah, Lilis Saidah., dan Cecep Taufiqurachman. 2020. *Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Bandung*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Vol.6, No. 2, Juli 2020.
- Permatasari, Intan., Endah Susilowati dan Oryza Tannar 2021. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening*. JIMEA. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi. Vol. 5, No. 2, 2021.
- Putra dan Rasmini. 2019. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*. FEB Universitas Udayana. Bali.

- Rahayu, S. 2010. Persepsi pemerintah daerah kota Jambi terhadap partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. *Journal Unja*.
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sari, Melisa Eka., Fefri Indra Azra., dan Salma Taqwa. 2019. *Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi. Vol. 1, No. 3, Seri E, Agustus 2019.
- Sedarmayanti. 2009, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukmawati, Fitir. 2019. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)*. Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal dan UMKM. Vol. 2, No. 1, Juni 2019.
- Sumaryadi, I. Nyoman., 2010, *Sosiologi Pemerintahan*. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor.
- Tilaar, H. A. R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Ultafiah, Weny. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Umami, R., & Nurodin, I. 2017. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi. *Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen*, 6 (11).
- Utami, K., & Efrizal, S. 2013. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik. *Jurnal WRA*, 1(1).
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulfadzal. 2020. *Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Di Gampong Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar – Raniry, Banda Aceh.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1 Biodata Peneliti

Nama : Andi Syafri Tanete
Tempat, Tanggal Lahir : Pasar Baru, 19 Mei 1998
Tipe kelamin : Laki-Laki
Alamat : Moncongloe, Kab. Maros
Telpon : 085222376330
Alamat Email : andisyafrit@gmail.com
Pendidikan Forma : 1. SDI Pasar Baru
2. SMPN 2 Tanete Riaja
3. SMAN 3 Barru



Lampiran 2 Dokumentasi



(Foto bersama kepala Desa Kading dan Babinsa Desa kading)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) Tahun Anggaran 2023
DESA KADING BUKIT BARU KEC. TANGETIYAN KABUPATEN

Kategori	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
PENDAPATAN	Pendapatan Asli Desa	1.000.000	1.000.000
	Pendapatan Lain-lain	2.000.000	2.000.000
BEBAN	Beban Tetap	3.000.000	3.000.000
	Beban Tidak Tetap	4.000.000	4.000.000
Jumlah		6.000.000	6.000.000

(Foto anggaran pendapatan dan belanja Desa APBDesa Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Desa kading)

KUESIONER PENELITIAN

Identitas Responden

1. Nomor responden :(diisi oleh peneliti)
2. Umur :.....(tahun)
3. Jenis kelamin : (Laki-Laki/Perempuan*)
4. Pendidikan :.....

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

KS : Kurang Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

DAFTAR PERNYATAAN

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	KS	S	SS
A	Akuntabilitas (X1)					
1.	Pemerintah Desa harus memiliki prosedur hukum pedoman dana Desa sebagai landasan dalam pembuatan keputusan.					
2.	Proses penetapan program – program dana Desa					

	dirancang dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran.					
3.	Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam penggunaan dana Desa.					
4.	Pemerintah Desa telah mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan public secara proporsional kepada public melalui laporan pertanggungjawaban.					
5.	Pertanggungjawaban tim pengelola dana Desa kepada masyarakat melalui laporan realisasi dana Desa.					

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	KS	S	SS
B	Transparansi (X2)					
1.	Informasi tentang keuangan dana Desa dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat maupun pihak pengguna informasi lainnya baik melalui media elektronik maupun media informasi lainnya.					
2.	Pengumuman keuangan desa, baik perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban maupun pengawasan telah dilaksanakan oleh pemerintah desa.					
3.	Pejabat pengelola teknis keuangan desa (PPTKD) berikap <i>welcome and open management</i> terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi tentang dana Desa.					
4.	Pemerintah Desa sepenuhnya menyadari akan kewajibannya untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka menyeluruh dan jujur kepada masyarakat.					

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	KS	S	SS

C	Partisipasi (X3)					
1.	Pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan.					
2.	Masyarakat setuju dengan ikut serta dalam proses pelaksanaan.					
3.	Program yang ditetapkan mengacu pada kebutuhan masyarakat.					
4.	Evaluasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana suatu pelaksanaan program telah berjalan dengan baik.					

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	KS	S	SS
D	Pengelolaan Dana Desa (Y)					
1.	Pemerintah Desa sebagai pemegang amanah (<i>agent</i>) telah mampu membuat perencanaan dengan melaporkan segala aktivitas dari kegiatan, dibuktikan dengan memberikan pertanggungjawaban dan menyajikan laporan hasil perencanaan.					
2.	Pemerintah Desa telah mampu melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara ekonomis, efisien dan efektif juga adil merata.					
3.	Pemerintah Desa telah melakukan pencatatan seriap penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan dana Desa dan dibuktikan dengan bukti – bukti yang sah juga dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban.					
4.	Pemerintah Desa membuat dan memberikan laporan yang baik, benar dan tepat waktu atas semua pengelolaan dana.					
5.	Pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara terbuka, jujur, akuntabel, ekonomis, efisien dan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.					

LAMPIRAN

No	Umur		Jenis Kelamin	Pend.	Akuntabilitas (X1)						Transparansi (X2)						Partisipasi Masyarakat (X3)						Pengelolaan Dana Kelurahan (Y)							
	Tahun	Kategori			1	2	3	4	5	T	R	1	2	3	4	T	R	1	2	3	4	T	R	1	2	3	4	5	T	R
1	31	<40 TAHUN	Perempuan	S2	3	4	3	3	3	16	3,20	3	4	3	4	14	3,50	4	3	3	3	13	3,25	3	3	3	3	3	15	3,00
2	30	<40 TAHUN	Perempuan	S2	4	4	4	4	4	20	4,00	3	4	4	4	15	3,75	4	4	4	4	16	4,00	4	4	4	3	4	19	3,80
3	34	<40 TAHUN	Laki-laki	S1	4	3	4	4	4	19	3,80	4	3	4	3	14	3,50	4	3	4	4	15	3,75	4	3	4	3	4	18	3,60
4	37	<40 TAHUN	Laki-laki	S1	4	4	4	4	2	18	3,60	4	4	4	4	16	4,00	4	4	4	4	16	4,00	4	4	4	4	2	18	3,60
5	42	≥40 TAHUN	Laki-laki	S2	2	2	3	3	2	12	2,40	2	1	3	3	9	2,25	3	3	3	4	13	3,25	2	2	2	3	2	11	2,20
6	44	≥40 TAHUN	Laki-laki	S2	4	4	4	4	3	19	3,80	4	4	4	4	16	4,00	4	4	4	4	16	4,00	4	4	4	4	3	19	3,80
7	37	<40 TAHUN	Perempuan	S1	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	16	4,00	4	4	3	4	15	3,75	4	4	3	4	4	19	3,80
8	43	≥40 TAHUN	Laki-laki	S2	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	16	4,00	4	4	4	4	16	4,00	4	4	4	4	4	20	4,00
9	40	≥40 TAHUN	Laki-laki	S1	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	3	3	14	3,50	4	3	4	4	15	3,75	4	3	4	4	4	19	3,80
10	41	≥40 TAHUN	Laki-laki	S1	4	3	3	4	3	17	3,40	4	4	3	4	15	3,75	4	3	3	4	14	3,50	4	3	3	4	3	17	3,40
11	43	≥40 TAHUN	Laki-laki	S1	4	3	3	4	3	17	3,40	3	3	4	4	14	3,50	4	3	3	4	14	3,50	4	3	3	4	3	17	3,40
12	42	≥40 TAHUN	Laki-laki	S1	2	3	2	3	3	13	2,60	3	2	2	2	9	2,25	3	3	3	4	13	3,25	2	2	2	3	3	12	2,40
13	39	<40 TAHUN	Laki-laki	S1	2	3	3	2	3	13	2,60	2	2	2	3	9	2,25	3	4	3	3	13	3,25	2	3	2	2	3	12	2,40
14	42	≥40 TAHUN	Laki-laki	S1	3	4	2	3	3	15	3,00	4	3	2	2	11	2,75	4	4	2	3	13	3,25	3	4	2	3	3	15	3,00
15	45	≥40 TAHUN	Laki-laki	S1	2	2	3	2	3	12	2,40	1	2	2	2	7	1,75	3	3	3	3	12	3,00	2	2	2	2	3	11	2,20
16	47	≥40 TAHUN	Laki-laki	S1	4	4	3	4	4	19	3,80	4	4	4	4	16	4,00	4	4	3	4	15	3,75	4	4	3	4	4	19	3,80
17	44	≥40 TAHUN	Laki-laki	S2	3	2	3	3	2	13	2,60	3	1	2	2	8	2,00	4	3	3	4	14	3,50	3	2	2	3	2	12	2,40
18	38	<40 TAHUN	Laki-laki	S1	3	3	4	2	4	16	3,20	4	4	4	3	15	3,75	3	3	4	2	12	3,00	3	3	4	2	4	16	3,20
19	39	<40 TAHUN	Laki-laki	S1	2	2	3	2	1	10	2,00	2	2	1	2	7	1,75	3	3	3	3	12	3,00	2	2	2	2	1	9	1,80
20	41	≥40 TAHUN	Perempuan	S1	4	4	3	4	2	17	3,40	3	4	4	4	15	3,75	4	4	3	4	15	3,75	4	4	3	4	2	17	3,40

21	41	≥40 TAHUN	Laki-laki	S1	4	4	4	4	4	20	4,00	4	3	3	3	13	3,25	4	4	3	4	15	3,75	4	4	3	4	4	19	3,80
22	48	≥40 TAHUN	Laki-laki	S1	4	2	4	4	2	16	3,20	3	4	3	2	12	3,00	4	2	3	4	13	3,25	4	2	3	4	2	15	3,00
23	43	≥40 TAHUN	Laki-laki	S1	3	3	3	4	3	16	3,20	3	3	4	4	14	3,50	3	3	3	4	13	3,25	3	3	3	4	2	15	3,00
24	42	≥40 TAHUN	Laki-laki	S1	4	3	4	4	2	17	3,40	3	3	1	2	9	2,25	4	3	4	4	15	3,75	4	3	4	4	2	17	3,40
25	34	<40 TAHUN	Laki-laki	S1	2	2	2	2	2	10	2,00	2	1	3	1	7	1,75	3	3	3	3	12	3,00	2	2	2	2	2	10	2,00
26	42	≥40 TAHUN	Laki-laki	S2	3	3	3	2	2	13	2,60	3	3	1	2	9	2,25	4	4	3	3	14	3,50	3	3	2	2	2	12	2,40
27	39	<40 TAHUN	Laki-laki	S1	3	3	4	3	2	15	3,00	4	4	4	4	16	4,00	3	2	4	3	12	3,00	3	2	4	3	2	14	2,80
28	40	≥40 TAHUN	Laki-laki	S1	3	3	2	3	1	12	2,40	3	3	3	2	11	2,75	2	3	2	3	10	2,50	2	3	2	3	1	11	2,20
29	43	≥40 TAHUN	Laki-laki	S1	3	3	3	3	3	15	3,00	2	2	3	3	10	2,50	3	2	3	3	11	2,75	3	2	3	3	3	14	2,80
30	42	≥40 TAHUN	Laki-laki	S1	4	3	3	4	3	17	3,40	4	4	4	4	16	4,00	4	3	3	4	14	3,50	4	3	3	4	3	17	3,40
31	47	≥40 TAHUN	Laki-laki	S1	3	3	3	3	3	15	3,00	3	2	4	4	13	3,25	4	4	4	4	16	4,00	3	3	3	3	3	15	3,00
32	37	<40 TAHUN	Perempuan	S1	4	4	4	4	4	20	4,00	4	4	4	4	16	4,00	4	4	4	4	16	4,00	4	4	4	4	4	20	4,00
33	43	≥40 TAHUN	Laki-laki	S1	3	3	3	2	2	13	2,60	3	2	2	3	10	2,50	4	4	4	3	15	3,75	3	3	3	2	2	13	2,60
34	34	<40 TAHUN	Perempuan	S1	2	2	2	3	2	11	2,20	3	3	2	3	11	2,75	3	3	3	4	13	3,25	2	2	2	3	2	11	2,20

LAMPIRAN

Validitas

		Correlations					
		X11	X12	X13	X14	X15	Akuntabilitas
X11	Pearson Correlation	1	.653**	.652**	.833**	.449**	.894**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.008	.000
	N	34	34	34	34	34	34
X12	Pearson Correlation	.653**	1	.398*	.537**	.581**	.795**
	Sig. (2-tailed)	.000		.020	.001	.000	.000
	N	34	34	34	34	34	34
X13	Pearson Correlation	.652**	.398*	1	.469**	.452**	.732**
	Sig. (2-tailed)	.000	.020		.005	.007	.000
	N	34	34	34	34	34	34
X14	Pearson Correlation	.833**	.537**	.469**	1	.410*	.815**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.005		.016	.000
	N	34	34	34	34	34	34
X15	Pearson Correlation	.449**	.581**	.452**	.410*	1	.745**
	Sig. (2-tailed)	.008	.000	.007	.016		.000
	N	34	34	34	34	34	34
Akuntabilitas	Pearson Correlation	.894**	.795**	.732**	.815**	.745**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	34	34	34	34	34	34

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X21	X22	X23	X24	Transparansi
X21	Pearson Correlation	1	.725**	.503**	.500**	.798**
	Sig. (2-tailed)		.000	.002	.003	.000
	N	34	34	34	34	34
X22	Pearson Correlation	.725**	1	.528**	.614**	.857**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.000	.000
	N	34	34	34	34	34
X23	Pearson Correlation	.503**	.528**	1	.745**	.838**
	Sig. (2-tailed)	.002	.001		.000	.000
	N	34	34	34	34	34
X24	Pearson Correlation	.500**	.614**	.745**	1	.857**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000		.000
	N	34	34	34	34	34
Transparansi	Pearson Correlation	.798**	.857**	.838**	.857**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	34	34	34	34	34

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X31	X32	X33	X34	Partisipasi
X31	Pearson Correlation	1	.448**	.363*	.501**	.829**
	Sig. (2-tailed)		.008	.035	.003	.000
	N	34	34	34	34	34
X32	Pearson Correlation	.448**	1	.145	.190	.672**
	Sig. (2-tailed)	.008		.414	.282	.000
	N	34	34	34	34	34
X33	Pearson Correlation	.363*	.145	1	.173	.605**
	Sig. (2-tailed)	.035	.414		.327	.000
	N	34	34	34	34	34
X34	Pearson Correlation	.501**	.190	.173	1	.657**
	Sig. (2-tailed)	.003	.282	.327		.000
	N	34	34	34	34	34
Partisipasi	Pearson Correlation	.829**	.672**	.605**	.657**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	34	34	34	34	34

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Pengelolaan Dana Kelurahan
Y1	Pearson Correlation	1	.666**	.754**	.764**	.512**	.922**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.002	.000
	N	34	34	34	34	34	34
Y2	Pearson Correlation	.666**	1	.488**	.499**	.511**	.789**
	Sig. (2-tailed)	.000		.003	.003	.002	.000
	N	34	34	34	34	34	34
Y3	Pearson Correlation	.754**	.488**	1	.498**	.491**	.808**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003		.003	.003	.000
	N	34	34	34	34	34	34
Y4	Pearson Correlation	.764**	.499**	.498**	1	.282	.752**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.003		.106	.000
	N	34	34	34	34	34	34
Y5	Pearson Correlation	.512**	.511**	.491**	.282	1	.719**
	Sig. (2-tailed)	.002	.002	.003	.106		.000
	N	34	34	34	34	34	34
Pengelolaan Dana Kelurahan	Pearson Correlation	.922**	.789**	.808**	.752**	.719**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	34	34	34	34	34	34

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliabilitas


```

RELIABILITY
/VARIABLES=X11 X12 X13 X14 X15
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	34	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	34	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.853	5

```

RELIABILITY
/VARIABLES=X21 X22 X23 X24
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	34	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	34	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.856	4

```

RELIABILITY
/VARIABLES=X31 X32 X33 X34
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	34	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	34	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.628	4

```

RELIABILITY
/VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	34	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	34	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items

.855	5
------	---

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.992 ^a	.984	.982	.08766

a. Predictors: (Constant), Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Kelurahan

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13.774	3	4.591	597.467	.000 ^b
	Residual	.231	30	.008		
	Total	14.005	33			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Kelurahan

b. Predictors: (Constant), Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas

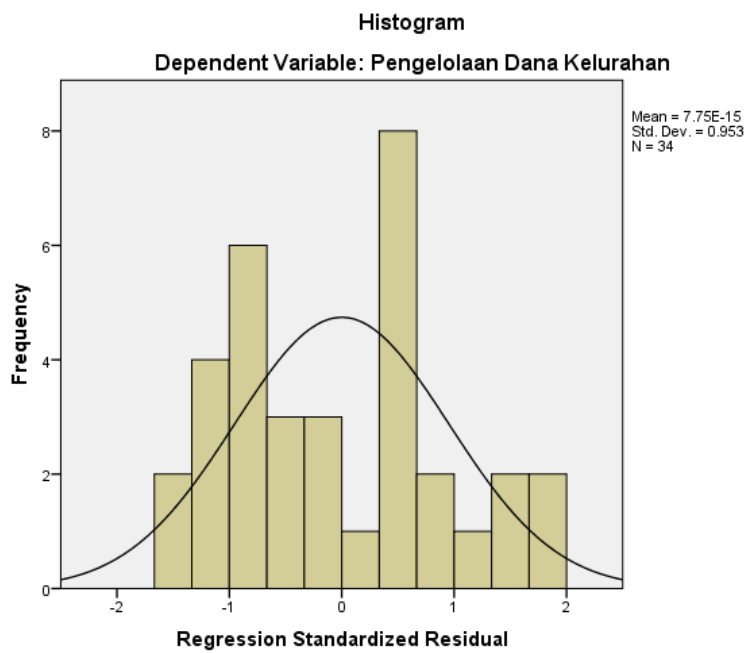
Analisis Regresi, Uji t dan Uji Multikolinearitas

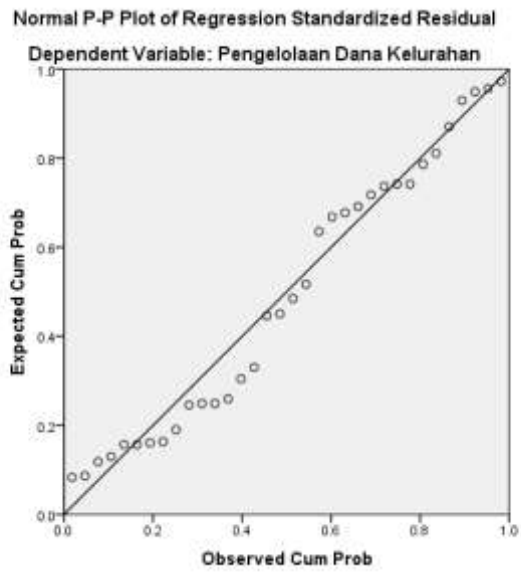
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	1	(Constant)	-.500	.136			
	Akuntabilitas	.867	.052	.834	16.713	.000	.220 4.538
	Transparansi	.087	.034	.105	2.543	.016	.321 3.111
	Partisipasi	.157	.055	.096	2.873	.007	.490 2.043

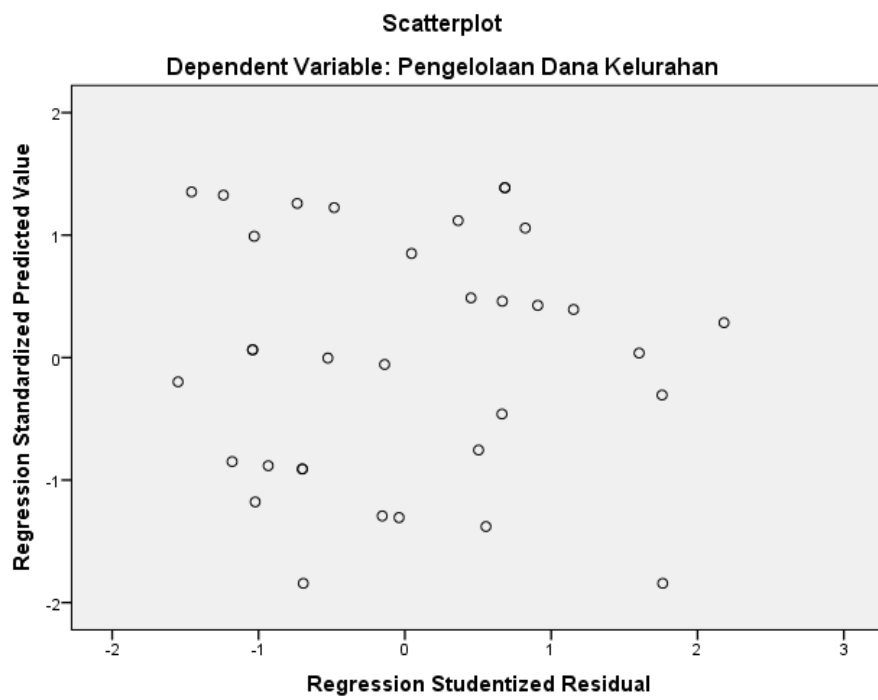
a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Kelurahan

Uji Normalitas





Uji Heteroskedastisitas



Karakteristik Responden

Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<40 TAHUN	12	35.3	35.3	35.3
Valid ≥40 TAHUN	22	64.7	64.7	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-laki	28	82.4	82.4	82.4
Valid Perempuan	6	17.6	17.6	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
S1	24	70.6	70.6	70.6
Valid S2	7	20.6	20.6	29.4
SMA	3	8.8	8.8	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Distribusi Jawaban Responden

X11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	7	20.6	20.6	20.6
3	11	32.4	32.4	52.9
4	16	47.1	47.1	100.0
Total	34	100.0	100.0	

X12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	7	20.6	20.6	20.6
3	15	44.1	44.1	64.7
4	12	35.3	35.3	100.0
Total	34	100.0	100.0	

X13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	5	14.7	14.7	14.7
3	16	47.1	47.1	61.8
4	13	38.2	38.2	100.0
Total	34	100.0	100.0	

X14

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2	7	20.6	20.6	20.6
3	10	29.4	29.4	50.0
4	17	50.0	50.0	100.0
Total	34	100.0	100.0	

X15

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	2	5.9	5.9	5.9
2	11	32.4	32.4	38.2
3	12	35.3	35.3	73.5
4	9	26.5	26.5	100.0
Total	34	100.0	100.0	

X21

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	2.9	2.9	2.9
2	5	14.7	14.7	17.6
3	14	41.2	41.2	58.8
4	14	41.2	41.2	100.0
Total	34	100.0	100.0	

X22

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	3	8.8	8.8	8.8
2	7	20.6	20.6	29.4
Valid 3	9	26.5	26.5	55.9
4	15	44.1	44.1	100.0
Total	34	100.0	100.0	

X23

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	3	8.8	8.8	8.8
2	7	20.6	20.6	29.4
Valid 3	9	26.5	26.5	55.9
4	15	44.1	44.1	100.0
Total	34	100.0	100.0	

X24

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	1	2.9	2.9	2.9
2	9	26.5	26.5	29.4
Valid 3	9	26.5	26.5	55.9
4	15	44.1	44.1	100.0
Total	34	100.0	100.0	

X31

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	-----------	---------	---------------	--------------------

	2	1	2.9	2.9	2.9
Valid	3	11	32.4	32.4	35.3
	4	22	64.7	64.7	100.0
	Total	34	100.0	100.0	

X32

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	2	3	8.8	8.8	8.8
Valid	3	17	50.0	50.0	58.8
	4	14	41.2	41.2	100.0
	Total	34	100.0	100.0	

X33

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	2	2	5.9	5.9	5.9
Valid	3	20	58.8	58.8	64.7
	4	12	35.3	35.3	100.0
	Total	34	100.0	100.0	

X34

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	2	1	2.9	2.9	2.9
Valid	3	11	32.4	32.4	35.3

4	22	64.7	64.7	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Y1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	8	23.5	23.5	23.5
3	10	29.4	29.4	52.9
4	16	47.1	47.1	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Y2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	10	29.4	29.4	29.4
3	14	41.2	41.2	70.6
4	10	29.4	29.4	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Y3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	11	32.4	32.4	32.4
3	13	38.2	38.2	70.6
4	10	29.4	29.4	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Y4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	7	20.6	20.6	20.6

3	12	35.3	35.3	55.9
4	15	44.1	44.1	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Y5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	2	5.9	5.9	5.9
2	12	35.3	35.3	41.2
Valid 3	11	32.4	32.4	73.5
4	9	26.5	26.5	100.0
Total	34	100.0	100.0	



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN TANETE RIAJA
DESA KADING**

Alamat : Jl.Lasabang Dusun Bunne RT III No 05 Kode Pos 90762

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 000.9.2/599/DesaKading

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. AKMALUDDIN**
Jabatan : Kepala Desa Kading
Alamat : Pasar Baru, Desa Kading

Menerangkan bahwa :

Nama : **ANDI SYAFRI TANETE**
NIM : 16010421111
Program Studi : Manajemen
Jenjang Program : Strata Satu (S1)
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Syariah
Alamat : Dusun Pasar Baru, Desa Kading, Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru

Yang tersebut namanya di atas adalah benar telah melakukan penelitian/ pengambilan Data di Wilayah/Kantor Desa Kading dalam rangka penyusunan ***Skripsi*** Sesuai dengan surat dari Universitas Fajar Makassar Perihal Permohonan Izin Penelitian nomor : 0893/B/DFEIS-UNIFA/VII/2023 dengan judul :

**"PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KHUSUS DESA KADING, KECAMATAN
TANETE RIAJA, KABUPATEN BARRU)"**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kading, 31 Juli 2023

KEPALA DESA KADING

H. AKMALUDDIN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Rektor Universitas Fajar Makassar;
2. Camat Tanete Riaja;
3. Ketua Prodi Manajemen Universitas Fajar Makassar;